

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU

Oleh
Meiga Ervianti
meigaervianti11@gmail.com

Pembimbing : Adianto
Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Traffic problems in Pekanbaru City did not show any good change, one of the traffic problems that quite disturb the community activity is the occurrence of traffic jam. One of the efforts in the Regional Regulation of Pekanbaru Number 2 of 2009 on Traffic and Road Transport, to overcome traffic jam is with Management and Traffic Engineering. The government implements a collaborative process that is collaborative governance involving state or government agencies, the private sector, and civil society in traffic management and engineering to resolve the traffic jam. The purpose of this study is to find out how the implementation and the factors that obstruct the Collaborative Governance in the Implementation of Management and Traffic Engineering in Pekanbaru City. The concept of theory used is the theory of collaborative governance by Donahue and Zeckhauser that is the process of collaboration in government seen from the collaboration for productivity, collaboration for information, collaboration for legitimacy and collaboration for resources. This research uses qualitative research method with case study approach and descriptive data assessment. . Techniques of data collection through interviewing techniques, observation and documentation by using purposive sampling method in the selection of informants. The result of this research is the implementation of management and traffic engineering with collaborative governance not maximal yet, which is caused by socialization process which is not evenly distributed, lack of supervision and action, lack of competent human resources in the engineering field and communities that have not participated in the traffic discipline especially in the engineering area, so that the implementation of traffic management and engineering is not running maximally.

Keywords: *Traffic jam, Collaborative Governance, Management and Traffic Engineering*

Latar Belakang

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, sudah bisa dilihat kota Pekanbaru menggiatkan akses pembangunan di berbagai bidang yang semakin berkembang setiap tahunnya, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pelayanan serta bidang transportasi dan lain sebagainya. Disamping itu, pertumbuhan penduduk juga semakin bertambah setiap tahunnya, yang menyebabkan bertambah pula salah satu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yaitu pentingnya transportasi sebagai sarana yang memudahkan pekerjaan dan aktivitas masyarakat. Alat transportasi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perpindahan baik itu barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sebuah kendaraan yang dijalankan oleh mesin.

Perkembangan Kota Pekanbaru khususnya dalam bidang transportasi cukup pesat, termasuk alat transportasinya. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor bagi setiap individu atau organisasi di Kota Pekanbaru, baik roda dua maupun roda empat. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor ini, ternyata bisa menjadi masalah yang serius, apabila tidak dikelola dengan baik. Karena apabila tidak diperhatikan, peningkatan kendaraan dengan jumlah sarana dan prasarana jalan yang dimiliki dalam berlalu lintas, maka akan menyebabkan terjadinya kemacetan dan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu dibutuhkan suatu kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan teratur agar tidak terjadi masalah lalu lintas lainnya. Selain itu masyarakat juga perlu untuk tertib dalam berlalu lintas, taat terhadap rambu-rambu lalu lintas yang terpasang,

agar tercipta kondisi lalu lintas yang kondusif.

pemerintah daerah sudah berupaya untuk mengatur kondisi lalu lintas serta mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Peraturan daerah ini diterbitkan di latar belakang oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berkendara.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Bab XVII tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, pada pasal 196 ayat 1 disebutkan bahwa "*Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, serta pelaksanaan manajemen pengendalian dan pengaturan sistem lalu lintas dalam wilayah kota*". Kebijakan ini menderivasi kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur penanganan berbagai permasalahan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu pada Bab II tentang Asas dan Tujuan pada pasal 3 dinyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan "*terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa*".

Tujuan ini ditetapkan sebagai upaya untuk mendukung agar terjaminnya hak-

hak warga negara untuk memperoleh sebuah kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, teratur dan lancar. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan mengingat pentingnya kendaraan untuk menunjang aktivitas masyarakat, dari kondisi tersebut muncul berbagai permasalahan lalu lintas di dalam kota, seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna kendaraan bermotor. Berikut permasalahan lalu lintas dan upaya pemecahannya :

Tabel 1.1
Permasalahan Lalu Lintas dan Upaya Pemecahan

N o.	Permasalahan	Ruas Jalan/ Persimpangan/ Lokasi	Upaya yang dilakukan	Posisi
1.	Terminal AKAP BRPS	Jl. Tuanku Tambusai	Penertiban Angkutan	Luar CBD
2.	Parkir On Street	Pertokoan	Paralel/ Derek/ Survey	Dalam Kota
3.	Fasilitas Lalu Lintas	Dalam Kota	Pengadaan	Persimpangan/ Jalan
4.	Kemacetan	Dalam Kota	MRL, CCTV dan ATCS	Dalam Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Tabel 1.1 menunjukkan berbagai permasalahan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru. Pada terminal AKAP masalah yang di temui yaitu banyaknya angkutan umum membentuk terminal liar di luar terminal, kemudian untuk area pertokoan di pinggir jalan yang menyebabkan masyarakat melakukan parkir *on street* yang menghambat arus lalu lintas, lalu juga ada masalah seperti rusaknya *traffic light* atau fasilitas lalu lintas lain yang perlu di perbaharui dan di lakukan perbaikan, dan terakhir kemacetan, yang menjadi salah satu masalah kota yang sangat sering di alami dan menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu salah satu

upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah dengan menerapkan MRL.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah serangkaian upaya untuk mengoptimalkan kinerja dan kondisi lalu lintas tanpa melakukan perubahan terhadap infrastruktur, yang dalam artian mengoptimalkan suatu keadaan yang sudah ada. Kemudian, rekayasa lalu lintas adalah suatu langkah untuk merekayasa lalu lintas dikarenakan adanya kebutuhan khusus, rekayasa lingkungan lalu lintas ini dilakukan melalui beberapa perencanaan dengan alat-alat lalu lintas guna memberikan keamanan, dan kenyamanan pergerakan bagi kendaraan maupun pejalan kaki.

Pelaksanaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas keduanya sudah diterapkan di beberapa lokasi Kota Pekanbaru yang membutuhkan upaya rekayasa karena kondisi yang macet dan padat pada suatu ruas jalan. Dalam penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru, pemerintah membangun sebuah pola kerjasama antara *state* (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru), *private sector* (pihak swasta yang terkena dampak MRL di Kota Pekanbaru), dan *civil society* (masyarakat).

Beberapa titik rawan kemacetan tersebut sudah di upayakan penyelesaiannya dengan cara melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, berikut contoh pelaksanaan dari manajemen lalu lintas yang sudah di terapkan di Kota Pekanbaru, diantaranya :

- a. ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)
- b. Pengendalian atau Perubahan Arus

Dalam mengatasi kemacetan dan berbagai permasalahan lalu lintas di Kota Pekanbaru, selain penerapan manajemen lalu lintas, dinas terkait juga menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas, adapun beberapa rekayasa lalu lintas yang sudah di terapkan diantaranya :

- a. Pembangunan *Fly-Over* (Jalan Layang)
- b. Jalan Satu Arah (*One Way*)
- c. HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)
- d.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sudah dilaksanakan oleh implementornya *state*, yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru, dengan melibatkan *private sector* yaitu pihak swasta dan *civil society* (masyarakat) dalam sebuah proses kolaborasi atau *Collaborative Governance*. Namun berbagai titik jalan masih tetap saja tidak menunjukkan perubahan dalam kelancaran berlalu lintas, walaupun sudah di berikan penanganan. Realitas ini menunjukkan bahwa konsep *collaborative governance* dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas masih belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Faktor-faktor apa saja yang menghambat *collaborative governance* dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat *collaborative governance* dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya Kebijakan Publik
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi untuk instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan masalah lalu lintas di Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.

Konsep Teori

1) Implementasi Kebijakan Publik

Secara terminology, pengertian kebijakan publik (public policy) sangat banyak. Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata Inggris *“policy”* dan, policy atau kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. Policy dalam konteksnya tidak dapat dipisahkan dengan politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijakan

adalah merupakan proses politik. *Policy* itu, apapun cakupannya, sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola (*patterns of actions*), yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak (*at random decision*) untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2016:8).

Menurut Edward dan Sharkansky dalam Kusumanegara (2010:4) kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan. Menurut Richard Rose dalam Ranjabar (2016:249) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari RC. Chandler dan JC. Plano dalam Syafiie (2003:107) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Lain halnya dengan Tachjan dalam Tahir (2015:53) mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu". Lalu, Barrett dalam Agustino (2016:128) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai, "...*translating policy into action*" atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jadi, implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

2) *Collaborative Governance*

Collaborative governance terdiri dari dua suku kata, "*collaborative*" dan "*governance*". Kata "*governance*" merupakan istilah yang merujuk pada pemerintahan. Sejauh ini banyak penelitian dan pendapat para ahli yang mendefinisikan istilah "*governance*" dengan pengertian yang berbeda-beda. Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim *government* (Sumarto, 2003:2).

Sementara itu, istilah *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:2) didefinisikan sebagai berikut : "*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*" merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Fokus *collaborative governance* adalah pada kebijakan dan masalah publik. Walaupun lembaga publik memiliki otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di antara para *stakeholders* (bukan penekanan pada lembaga publik).

Di kutip dalam bukunya *Collaborative Governance-Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*, Donahue dan Zeckhauser (2011:63) menyatakan bahwa *collaborative governance* dilihat dari 4 hal yaitu :

1. Collaboration for Productivity (Kolaborasi untuk Produktivitas)

“..Government agencies have their own pressures, to be sure, but these include imperatives for transparency, due process, and even-handedness, frequently at the expense of maximum productivity.¹ Sometimes narrow productive efficiency is a second-order goal for government. Sometimes when productivity does matter greatly, government can tap private-sector advantages through simple contracting. And sometimes—the subject of this book, and in particular this chapter—public-private collaboration is the most promising way for government to arrange for the productive pursuit of its missions..”

(Yang dapat diartikan sebagai berikut: lembaga pemerintahan memiliki tekanannya sendiri, sudah pasti, termasuk keharusan untuk transparansi, sesuai proses, dan bahkan kewewenangannya, yang seringkali mengorbankan biaya produktivitas maksimal. Efisiensi produktif yang sempit merupakan tujuan kedua bagi pemerintah. Terkadang ketika produktivitas sangat penting, pemerintah dapat memanfaatkan keuntungan sektor swasta melalui kontrak sederhana. Dan pokok dari buku ini, dan khususnya pada bab ini, kolaborasi publik-swasta adalah cara yang paling menjanjikan bagi pemerintah untuk mengatur produktivitas pemerintahan misinya.)

2. Collaboration for Information (Kolaborasi untuk Informasi)

“..When government lacks information essential to the accomplishment of a public mission—and private actors possess it—collaboration is an imperative, not an option. To go it alone is to travel blind. This is not so, of course, if government can easily acquire the necessary information. But vital data

sometimes cannot be obtained with reasonable speed, at reasonable cost, and with reasonable reliability. The private sector may, for reasons good or bad, refuse to divulge everything it knows. Or information may be so deeply embedded in a private organization, so hard to provide or interpret correctly outside its context, that even the most willing private player cannot fully or effectively share it with government. Or government may suspect (again, for reasons good or bad) that information transfers would be biased, incomplete, or distorted so that public officials cannot be confident that they have the truth at all, much less the whole truth and nothing but. In such circumstances, turning to better-informed partners can be a powerful motive for collaboration. But it also means that government starts off with a built-in information deficit relative to its private-sector counterparts, suggesting special challenges in the pursuit of efficiency, accountability, and fairness..”

(Yang dapat diartikan sebagai berikut : ketika pemerintah kekurangan informasi yang penting untuk pencapaian misi publik—dan organisasi swasta memilikinya—maka melakukan kolaborasi merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan. Untuk menjalankannya sendiri itu akan sulit. Namun tidak begitu, tentu saja, jika pemerintah dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan. Tapi data yang penting terkadang tidak bisa didapat dengan kecepatan yang wajar, dengan biaya terjangkau, dan alasan yang masuk akal. Sektor swasta, untuk alasan yang baik atau buruk, menolak untuk membocorkan semua yang mereka tahu. Informasi bisa begitu sangat disimpan di organisasi swasta, sehingga sulit untuk diberikan atau ditafsirkan dengan benar di luar konteksnya, bahkan orang pribadi yang paling mau sekalipun tidak dapat

sepenuhnya atau secara efektif membaginya dengan pemerintah. Atau pemerintah mungkin mencurigai (sekali lagi, untuk alasan yang baik atau buruk) bahwa transfer informasi akan menjadi miring, tidak lengkap, atau berubah sehingga pejabat publik tidak yakin bahwa mereka memiliki semua kebenaran tentang informasi tersebut. Pada persoalan ini, membentuk mitra informasi yang lebih baik bisa menjadi motif kolaborasi yang kuat. Tapi itu berarti pemerintah mulai membangun sebuah informasi defisit relatif terhadap rekan-rekan sektor swasta, menyarankan tantangan khusus dalam mengejar efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan.)

3. *Collaboration for Legitimacy* (Kolaborasi untuk Legitimasi)

Legitimasi adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin.

Dalam bukunya, Donahue dan Zeckhauser (2011:122) menyatakan bahwa :

“..Many collaborations are motivated in part by the private sector's legitimacy edge in a particular arena. In some cases legitimacy is the central motive, though pragmatic and philosophical considerations are virtually always interwoven in any concrete case. Yet without gainsaying the influence of other factors, we now consider a few cases in which legitimacy looms large in the choice of the means for achieving some public mission.

(Yang dapat diartikan : Banyak kolaborasi didorong sebagian oleh legitimasi sektor swasta di arena tertentu.

Dalam beberapa kasus, legitimasi adalah motif utama, walaupun pertimbangan pragmatis dan filosofis hampir selalu terjalin dalam beberapa kasus yang konkret. Namun, tanpa memperhitungkan pengaruh faktor-faktor lain, sekarang kita mempertimbangkan beberapa kasus di mana legitimasi menjadi pilihan terbesar dalam sarana untuk mencapai beberapa misi publik.

4. *Collaboration for Resources* (Kolaborasi untuk Sumber Daya)

Saat ini, kelangkaan sumber daya menjadi masalah di berbagai tempat. Hal ini lah yang dapat kita pelajari dalam buku *Collaborative Governance-Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*, sebagai berikut :

“..Scarce resources are a fact of modern government. A particularly common motive for collaboration, thus, is to augment government's own resources with those of private partners who have an interest in a particular governmental endeavor..”

(Yang dapat diartikan : Sumber daya yang langka adalah fakta pemerintahan modern. Sebuah motif yang sangat umum untuk kolaborasi, dengan demikian, motif itu adalah untuk meningkatkan sumber daya pemerintah sendiri dengan mitra swasta yang memiliki kepentingan dalam sebuah usaha pemerintah tertentu)

Collaborative governance membedakan dirinya dengan *partnership* melalui peran pemerintah di dalamnya. Dalam *partnership*, pemerintah bekerja dengan membangun jejaring, koalisi, dan kemitraan yang bertujuan menciptakan pelayanan yang efektif dengan relasi *government to citizen*. Pada *collaborative governance*, pemerintah bekerja melalui sektor privat dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik

(O'Flynn dan Wanna dalam Erwan, 2015:137).

Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut **Sugiyono (2006:11)** metode penelitian kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus yang merupakan sebuah penelitian kualitatif yang meliputi serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan intensif, rinci dan mendalam terhadap sebuah kegiatan, peristiwa atau fenomena untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa atau fenomena tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di Jl. Dr. Sutomo No.88 dan kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru di Jl. Ahmad Yani No. 11. Alasan penulis mengambil Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian tersebut adalah karena Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sedang mengalami perkembangan menuju sebuah kota besar dan sedang giat-giatnya mengencakan pembangunan di segala bidang terkhusus transportasi, sehingga masih sering terjadi kemacetan di titik-titik tertentu, yang menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Informan Penelitian

Key Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Informan Pelengkap yaitu:

1. Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
3. Masyarakat pengguna jalan dikota Pekanbaru

3. Sumber Data

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu state (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru), private sector (pihak swasta) dan civil society (masyarakat) yang berkaitan dengan penelitian Collaborative Governance dalam Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu di ruas jalan yang di rekayasa.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis seperti data rekayasa dan dokumentasi pribadi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, data angka kecelakaan lalu lintas dari Satlantas Polresta dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

- a. Observasi (pengamatan)
Yaitu pengamatan secara langsung terhadap realita yang terjadi pada objek yang diteliti yaitu ruas jalan yang menjadi sasaran rekayasa teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana *collaborative governance* dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas berjalan sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru.
- b. Interview (wawancara)
Dalam penelitian ini penulis melakukan proses wawancara mendalam (*in-depth interview*,) yaitu teknik wawancara yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian (Prastowo, 2016:212). *In-depth Interview* dilakukan penulis terhadap key informan yaitu Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan serta Kepala Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kemudian dengan beberapa informan pelengkap lain yang mengetahui implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru.
- c. Studi Kepustakaan
Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang melengkapi data primer, dan digunakan dalam landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan berupa teori-teori dari buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian *collaborative governance* dalam implementasi

manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru.

- d. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi yang langsung penulis ambil dilapangan terkait pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisa data analisis data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono:2008) yaitu:

- a. Data Reduction (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan di dicatat secara lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan dan dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan).
- b. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data dilakukan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion drawing/ verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses

penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek menjadi jelas.

Hasil

Faktor-faktor yang Menghambat Collaborative Governance dalam Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Pekanbaru

Setelah melakukan kegiatan observasi dan wawancara, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat penerapan collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru. Berikut penulis uraikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menghambat penerapan collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam hal ini bisa diartikan sebagai bagaimana peran masyarakat dalam berlalu lintas yang menjadi hal penting dalam terciptanya kondisi lalu lintas yang baik dan kondusif. Dalam penelitiannya yaitu collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru, penulis menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam disiplin dan patuh pada peraturan lalu lintas saat berkendara juga mempengaruhi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam taat berlalu lintas ini terjadi karena kurang pahamnya masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dari pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses interaksi berbagai pihak untuk saling memberikan informasi atau menyepakati suatu keputusan, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa berhasil di realisasikan. Dalam penelitian ini, koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antara pihak *state*, *private sector* dan *civil society* dalam penerapan collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru, sehingga apabila koordinasi bisa dilaksanakan dengan baik antar pihak *state* dan *private sector*, pelaksanaan kolaborasi untuk menunjang maksimalnya proses kolaborasi dapat terlaksana dengan baik. Kurangnya koordinasi antara *state*, *private sector* menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru.

3. Sosialisasi

Sosialisasi bisa di pahami sebagai hal yang penting dalam penerapan collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru, karena dengan adanya proses sosialisasi masyarakat menjadi terarah apabila ada pelaksanaan rekayasa lalu lintas di suatu ruas jalan, dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa tidak meratanya proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak *state* untuk area rekayasa, hal ini memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karna belum paham mengenai pelaksanaan rekayasa. Sosialisasi merupakan hal yang penting mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai tujuan dari pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga dengan maksimalnya proses sosialisasi dapat membuat

masyarakat menjadi lebih terarah dan beradaptasi dengan perubahan arus atau jenis rekayasa lainnya.

4. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai sebuah proses pemantauan atau suatu proses untuk memastikan apakah kegiatan sebuah instansi atau organisasi sesuai dengan apa yang di rencanakan. Dalam penerapan *collaborative governance* dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru, rendahnya tingkat pengawasan pihak state pada daerah rekayasa memicu masyarakat menjadi tidak tertib dalam berlalu lintas pada daerah rekayasa, selain itu karena rendahnya pengawasan, penindakan untuk masyarakat yang tertangkap melanggar penerapan rekayasa juga tidak maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan sebuah kebijakan. Sumber daya dalam hal ini dapat meliputi materi atau anggaran, fasilitas, implementor atau orang yang mengimplementasikan dan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota Pekanbaru, dalam penelitiannya penulis menemukan faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia, baik itu kualitas dan kuantitasnya untuk memaksimalkan penerapan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya yang berkompeten dibidangnya menjadi salah satu faktor yang dirasa kurang mendukung untuk penerapan manajemen dan rekayasa lalu

lintas, hal ini ditemukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terkhusus untuk staff atau tenaga ahli pada bidang manajemen dan kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menghambat penerapan *collaborative governance* dalam implelementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru yaitu diantaranya faktor partisipasi masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, faktor koordinasi seperti kurangnya koordinasi antara pihak *state* dan *private sector* dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, faktor sosialisasi yang tidak dilakukan secara merata di seluruh wilayah yang di rekayasa, kemudian faktor pengawasan dan penindakan yang tidak maksimal dilakukan oleh pihak *state* sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat, serta faktor kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- AG, Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media
- Donahue, John D. and Richard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. Princeton: Princeton University Press

- Indiahono, Dwianto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ranjabar, Jacobus. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hassel, Eddi dan T.Saiful. 2004. *Kebijakan Publik Dan Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu

B. Dokumen

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Elektronik

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi>
Diakses pada hari Selasa, 30 Januari 2018
- <https://m.goriau.com/> Diakses pada hari Selasa, 26 Juni 2018
- Alhadar, Ali. 2011. *Analisis Kinerja Jalan Dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Simpang Bersinyal Di Kota Palu*. Online (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTeK/article/view/890/709>). Diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2017

- Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. *"Collaborative Governance in Theory and Practice"*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Online (<http://www.albany.edu/faculty/krethema/PAD637/ClassNotes/Spring%202013/Summary13.pdf>). Diakses pada hari Jumat, 24 November 2017
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukkan di Kabupaten Ponorogo*. Online (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/27844/Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Collaborative-Governance-Dalam-Pengembangan-Industri-Kecil-Studi-Kasus-Tentang-Kerajinan-Reyog-Dan-Pertunjukan-Reyog-Di-Kabupaten-Ponorogo>). Diakses pada hari Minggu, 12 November 2017
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi and Stephen Balogh. 2011. *Integrative Framework for Collaborative Governance*. Online (<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>). Diakses pada 12 November 2017
- Junaidi. 2015. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang*. Online (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/jurnal-1.pdf).
- Diakses pada hari Minggu, 12 November 2017
- Lestari, Kartika Raihana. 2017. *Policy Argumentation Dalam Kebijakan dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan (Studi Kasus pada Ruas Jalan Berkapasitas Tinggi di Kota Bandar Lampung)*. Online (<http://digilib.unila.ac.id/28351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>). Diakses pada hari Minggu, 17 Desember 2017
- Triharyanto, Aris dan Lukito. 2016. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta*. Online (<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/1195>). Diakses pada hari Minggu, 12 November 2017
- Triguna, Hara Eka. 2015. *Koordinasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru*. Online (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5076/4956>). Diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017